

**STUDY KELAYAKAN PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUB) PETERNAK SAPI DI KABUPATEN TTU DAN TTS
– NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh:

Sri Seventi¹⁾, Heru Agustanto²⁾, Ahmad Daerobi³⁾, Arum setyowati ⁴⁾

E-mail: heru.agustanto@gmail.com

¹⁾Dosen FEB UNS – Solo

ABSTRACT

This study aims to answer the cattle farmer problems on how to strengthen the competitiveness and create the bargaining power in determining price. Business group become a model for empowerment and economic strengthening of cattle farmers. This research involves the cattle farmers from five district areas in Nusa Tenggara Timor (NTT) as sample.

A feasibility study of the business group of cattle farm is conducted as a research method. We use quantitative and qualitative approach. A quantitative approach is used to obtain the potential data of cattle supply availability in the long term. A qualitative approach is used to determine the willingness and desires of the community in establish business group activities in order to build bargaining power in the market. This willingness should not arise because the government intervention.

The result shows that; 1) In general, each village has 20-30 cattle farmer with the average number of cow is 4-12 cow/ farmer; 2) Each village sells an average of 10-15 cow/ month; 3) Business Group is feasible to establish in order to build competitiveness and create the bargaining power; 4) This Business Group is a community initiative; and 5) The government only serves as a facilitator. This Business Group create bargaining power in determining a fair price, become a farmer's tool to take care their cattle, build the joint capital, and develop self-reliance and prosperous society.

Key words: *cattle farmer, business group, competitiveness, bargaining power, empowerment*

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan bagaimana **memperkuat daya saing** dan **bargaining power** bagi petani sapi dalam hal harga jual yang sesuai (pantas) sebagai produsen sapi. Obyek penelitian dilakukan di tiga (desa) di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dua desa, dan di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) satu desa, Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara geografis kedua kabupaten tersebut berada di Pulau Timor dan sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebagian besar wilayah di daerah tersebut memiliki kontur perbukitan, pegunungan dan dataran rata berupa padang rumput dan persawahan. Dengan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk sebagai petani dan peternak sapi, terutama sapi potong.

Untuk mencari solusi terhadap permasalahan, maka perlu dilakukan suatu studi kelayakan pembentukan **Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani sapi** di dua wilayah tersebut sebagai sampel model pemberdayaan dan penguatan ekonomi petani dan peternak sapi untuk memperkuat bargaining power dengan pembeli.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data potensi ketersediaan pasokan sapi dalam kurun waktu jangka panjang. Data kualitatif digunakan untuk mengetahui kemauan dan keinginan masyarakat dengan pembentukan kegiatan usaha bersama dalam rangka membangun bargaining power di pasar. KUB yang didirikan, memang menjadi kebutuhan mereka, bukan karena intervensi pemerintah.

berdasarkan data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga desa yang dijadikan obyek penelitian (1) rata-rata setiap dusun terdapat 20-30 petani sekaligus peternak sapi dengan jumlah sapi berkisar 4 – 12 ekor. (2) setiap dusun rata-rata menjual 10-15 ekor sapi per bulan, (3) KUB di tiga desa layak didirikan sebagai sampel model membangun daya saing dan bargaining power bagi para petani dan peternak sapi, (4) KUB yang didirikan harus didasarkan pada keinginan dan inisiatif masyarakat sendiri, (5) pemerintah tingkat desa sampai tingkat pusat berperan sebagai fasilitator.

Dengan KUB diharapkan para petani sapi dapat saling berkolaborasi, bekerjasama secara berkelompok, sebagai sarana membangun kekuatan daya saing dan bargaining power dalam (1) **menentukan harga jual yang layak**; (2) **sarana belajar dan bekerjasama** dalam memelihara ternak yang baik; (3) **membangun modal bersama**, (4) **sebagai embrio membangun kemandirian**.

Kata kunci: bargaining power petani, model pemberdayaan dan penguatan ekonomi, KUB)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 dan kemudian berlanjut dengan terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai sekarang dampaknya masih sangat terasa oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dampak dari kedua krisis yang terjadi dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun telah membuat penduduk yang berada pada tingkat miskin sampai dengan tahun 2015 masih berada pada kisaran angka 30%. Sementara angka pengangguran juga masih berada pada angka diatas 15%. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi ke tingkat yang lebih baik sampai saat belum begitu terasa perubahannya. Ini dapat dilihat pada keadaan ekonomi sehari-hari dimana harga-harga kebutuhan bahan pokok masih tetap tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Sementara disisi lain daya beli masyarakat menurun, karena keterbatasan akses ekonomi dalam memperoleh pendapatan dari pekerjaan sangat terbatas.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (sejak tahun 2014) dengan program nawacita dan berfokus pada usaha pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas ekonomi dan mendorong percepatan kemandirian ekonomi, terutama bidang pangan. Program kemandirian bidang pangan meskipun sebenarnya juga sudah menjadi focus pembangunan ekonomi pemerintahan sebelumnya (Presiden SBY), belum dapat memberikan hasil yang cukup baik.

Data statistik tahun 2015 menunjukkan bahwa lebih dari 30 juta penduduk di Indonesia saat ini berada pada kategori miskin, demikian juga angka pengangguran juga masih relatif tinggi, meskipun sudah terjadi pengurangan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data akhir tahun 2015 diperkirakan masih terdapat lebih dari 8 juta pengangguran terbuka, belum ditambah rata pencari kerja baru sekitar 3 juta. Kondisi ini

tentunya akan sangat menyulitkan bagi pemerintah dalam usaha menanggulangi meningkatnya kemiskinan apabila tidak segera dicari upaya jalan keluarnya.

Salah satu sektor ekonomi yang sampai saat ini masih bertahan dan dapat sedikit mengurangi angka pengangguran selain beberapa jenis UMKM (terutama yang bergerak pada industri kerajinan dan industri kreatif), adalah sektor pertanian. Sektor pertanian (terutama padi, dan bahan pangan lainnya) merupakan salah satu sektor usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah pedesaan. Sektor ini menjadi salah satu penopang penghasilan utama yang masih mampu menyerap tenaga kerja masyarakat di pedesaan meskipun pada tingkat pendapatan yang tidak tinggi. Data tahun 2014-2015 mencatat sebanyak 40% pekerja di pedesaan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Meskipun belum dapat banyak membantu dalam pemulihan perbaikan ekonomi pasca krisis 1998 dan 2008, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk menanggulangi dan menopang kehidupan sebagian masyarakat di pedesaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya pada masa krisis saat ini.

World Bank Development Report (WDR) yang dikeluarkan oleh bank Dunia, sektor pertanian masih merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan bagi negara-negara berkembang. WDR mengisyaratkan bahwa pertumbuhan pertanian masih merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani miskin di pedesaan. Bagi masyarakat termiskin di pedesaan, pertumbuhan PDB yang berasal dari pertanian adalah sekitar 4 (empat) kali dalam mengurangi kemiskinan, apabila dibandingkan dengan PDB dari luar sektor pertanian.

Dari kajian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, PDB sektor pertanian Indonesia sampai tahun 2014 tercatat mencapai pertumbuhan 3,41% dan memberikan tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar lebih dari 40 juta jiwa. Sektor pertanian memegang peran sangat penting dan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia karena disanalah bertumpu permasalahan di pedesaan. Sektor pertanian berperan dalam perekonomian Indonesia melalui pembentukan PDB, perolehan devisa (meskipun masih tergolong kecil/sedikit), penyediaan pangan dan bahan baku industry, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran pertanian dalam mengentaskan kemiskinan menjadi begitu penting dan begitu sentral (Bisnis Indonesia, 2012)

Namun demikian pertanian di Indonesia belum mampu beranjak kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Program pembangunan pertanian masih terseret dalam urusan subsisten dengan penguasaan lahan sebagian besar petani yang relatif kecil terutama di pulau Jawa. Sektor pertanian sebenarnya dapat dijadikan salah satu tumpuan untuk memperbaiki ekonomi apabila pemerintah mempunyai kemauan dan komitmen yang serius untuk memberikan stimulant yang dapat mendorong pertumbuhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pemerintah melalui departemen dan dinas terkait mendorong dan memberikan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pernyataannya di Waduk Jatiluhur, mencanangkan program revitalisasi pertanian. Dimana dalam jangka panjang kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan pertanian adalah mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik. Yaitu agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani (Kompas, 2005). Ini berarti bahwa pemerintah telah menyadari betul bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu sektor penentu dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan sekaligus dapat dijadikan sebagai jaring pengaman untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Dalam pertemuan forum pemimpin redaksi media massa nasional di Nusa Dua Bali pada 14 Juni 2012. Menteri perdagangan saat itu (Gita Wiryawan)

melontarkan dua gagasan mendasar dalam produksi dan pengelolaan pangan nasional yaitu (1) kementerian yang dipimpinnya mendapatkan hak eksklusif mengelola tata niaga pangan, dan (2) kebijakan strategi pangan bukan lagi hanya diarahkan pada pencapaian swasembada, tetapi menjadikan Indonesia sebagai eksportir bahan pangan yang paling efisien (Kompas 17 Juni 2013). Kebijakan yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY, juga dilanjutkan dan dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan lebih konkrit lagi. Pada beberapa waktu setelah dilantik sebagai presiden yang ke tujuh, langkah konkrit untuk mendukung pembangunan sector pertanian dan mendorong percepatan kemandirian pangan dilakukan dengan membagikan alat-alat pertanian berupa traktor tangan, terutama di daerah-daerah pertanian. Disamping itu, untuk mendorong infrastruktur pendukung pertanian, juga telah dicanangkan program jangka panjang selain perbaikan-perbaikan waduk dan bendungan, juga membangun waduk-waduk dan embung-embung baru di daerah-daerah potensial untuk pengembangan pertanian dan industri pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Pusat maupun daerah untuk mendorong dan meningkatkan pendapatan petani tidak akan menarik bagi petani eksisting, maupun calon petani untuk mengandalkan hidup disektor pertanian apabila tidak dibuat suatu model pola pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian yang dapat menjamin petani untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Salah satu kendala yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan kepemilikan lahan pertanian. Rendahnya kepemilikan lahan garapan sebagian besar petani mengakibatkan rendahnya daya saing petani. Kondisi tersebut mendorong percepatan konversi tanah pertanian ke fungsi lain (biasanya untuk lahan industry/ pabrik atau perumahan) dengan alasan pertimbangan ekonomi bahwa menjadi petani tidak menguntungkan dan tidak dapat menjanjikan kehidupan masa depan yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari kenyataan, secara nasional telah terjadi penyusutan lahan pertanian produktif rata-rata 4% per tahun selama 10 tahun terakhir. Apabila hal ini tidak segera ditanggulangi maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi masalah yang serius dibidang penyediaan kebutuhan pokok berupa bahan pangan. Karena dengan penduduk sebanyak 240 juta jiwa, maka pangan merupakan masalah strategik yang harus dipikirkan serius oleh pemerintah. Sebab dengan semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai sumber utama penghasil bahan pangan akan berdampak pada (1) berkurangnya ketersediaan bahan pangan dan lapangan kerja, (2) semakin terjadi ketergantungan terhadap bahan pangan impor terutama beras, dan hortikultura lainnya, (3) tingkat kemiskinan akan bertambah.

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penghasilan petani, diantaranya adalah melalui:

1. **Diversifikasi usaha terkait** dengan pertanian yang dapat dilakukan oleh petani saat adalah usaha penggemukan sapi potong. Usaha ini dapat dilakukan mengingat bahwa satu sisi, kebutuhan akan sapi potong di Indonesia belum dapat dipenuhi oleh pasar domestik, dan cenderung sangat tergantung pasokan sapi import. Lokal wisdom masyarakat petani jaman dulu selalu yang namanya petani juga pasti memiliki hewan peliharaan yang berkaitan dengan pertanian (di Jawa di kenal dengan istilah *rojo koyo*). Selain itu, sebagian kebutuhan bahan makanan untuk ternak sapi dapat memanfaatkan limbah pertanian (jerami, bekatul, dan daun-daunan). Sementara limbah sapi (kotoran dan air kencing) pada skala tertentu dapat dijadikan pupuk, atau sumber *energy alternative* berupa biogas, dan pembasmi hama organik dan tidak merusak lingkungan serta dapat memperbaiki hara tanah. Limbah ternak sapi juga akan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan pupuk kimia (anorganik) yang pada tingkat

- penggunaan yang terus-menerus dan jangka panjang justru akan merusak lingkungan dan kesuburan tanah sehingga akan menurunkan produktivitas lahan.
2. **Pertanian terintegrasi (integrated farming)**, tetap menggunakan pola bahwa pekerja sektor pertanian (petani) juga sekaligus sebagai peternak sapi. Ini dapat dilakukan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang masih memiliki lahan terbuka yang cukup luas dan potensial untuk mengembangkan pertanian dan peternakan sekaligus. Salah satu contoh daerah yang dapat dibangun pola ini adalah daerah di NTT terutama di kepulauan Timor, dimana struktur geografisnya banyak terdapat padang rumput dan dataran rendah, serta perbukitan.
 3. **Kelompok usaha bersama**, dengan adanya kelompok dapat dijadikan sebagai tempat untuk sharing pengetahuan dan berbagai pengalaman dalam menjalankan kegiatan usaha pertanian dan peternakan mereka untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Permasalahan

Berkaitan dengan apa yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dicoba untuk dicarikan solusi penyelesaiannya adalah **pengkajian lebih mendalam mengenai kelayakan pemberdayaan ekonomi petani dan peternakan dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) peternak sapi**. Dengan kelompok usaha bersama petani dan peternak sapi ini diharapkan secara bertahap akan menjadi embrio untuk berdirinya sentra produksi dan pendukung kecukupan kebutuhan pangan (padi, jagung dan daging) skala regional maupun nasional.

Secara terperinci hasil pengkajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

1. Bagaimana gambaran **potensi kelayakan kelompok usaha bersama peternak sapi (khususnya untuk pemenuhan kebutuhan sapi potong)**, dan **pertanian terintegrasi dari aspek ekonomi** (analisis biaya dan pendapatan, serta skala usaha yang sesuai)
2. **Manajemen dan model pengelolaan usaha yang sesuai dengan lingkungan dan karakteristik petani (perilaku sosial masyarakat, culture, dan local wisdom)**.

Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan diversifikasi usaha terkait, sebagai salah satu alternative solusi untuk meningkatkan pendapatan petani yang berupa usaha penggemukan sapi potong.

- a. **Dari aspek ekonomi** penelitian ini bertujuan untuk **mendapatkan gambaran aktual, akurat, dan rasional melalui perhitungan secara ekonomi (1) dari usaha ternak sapi potong bagi petani, berupa analisis kelayakan usaha, skema pendanaan, dan skala dan bentuk organisasi usaha yang sesuai. (2) bagaimana membangun model system pertanian terintegrasi.**
- b. **Dari aspek non ekonomi**, hasil penelitian ini diharapkan mampu **memberikan gambaran model dan manajemen usaha yang sesuai dan dapat dijadikan salah satu acuan pemberdayaan ekonomi petani melalui usaha yang terkait dan sistem pertanian terintegrasi**
- c. **Sebagai embrio terbentuknya pengelolaan keuangan petani mandiri.**

2. Manfaat penelitian:

Hasil penelitian ini dengan adanya kelompok usaha bersama (KUB) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para petani dan peternak sapi, diantaranya:

- a. **Peningkatan pendapatan/kesejahteraan petani** melalui kegiatan pertanian dan peternakan sapi
- b. **Terjadi simbiosis positif antara usaha pertanian dengan peternakan sapi dengan pola pertanian terintegrasi** dengan pemanfaatan silang dari limbah pertanian dan limbah pemeliharaan sapi potong.
- c. **Mendorong proses percepatan kemandirian ekonomi petani dan program swasembada pangan.**
- d. **Mengurangi tingkat pengangguran dan ketergantungan tenaga kerja pada sektor industri**
- e. **Mengurangi tingkat urbanisasi penduduk desa ke kota lain untuk mencari pekerjaan** karena terbatasnya sumberdaya ekonomi dan lapangan pekerjaan di pedesaan.
- f. **Mengurangi penyusutan lahan pertanian produktif** (alihguna lahan) ke penggunaan diluar pertanian.
- g. **Mendorong terbentuknya kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan keuangan secara mandiri.**

Tinjauan Literatur Dan Hipotesis

Peran sektor pertanian dalam menanggulangi masalah pengangguran dan memiskinkan juga didukung oleh Bank Dunia. World Bank Development Report (WDR), merilis bahwa sektor pertanian masih merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan bagi negara-negara berkembang. WDR mengisyaratkan bahwa pertumbuhan pertanian masih merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani miskin di pedesaan. Bagi masyarakat termiskin di pedesaan, pertumbuhan PDB yang berasal dari pertanian adalah sekitar 4 (empat) kali dalam mengurangi kemiskinan, apabila dibandingkan dengan PDB dari luar sektor pertanian.

Dari kajian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, PDB sektor pertanian Indonesia sampai tahun 2015 tercatat mencapai pertumbuhan 3,41% dan memberikan tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar lebih dari 40 juta jiwa. Sektor pertanian memegang peran sangat penting dan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia karena disanalah bertumpu permasalahan di pedesaan. Sektor pertanian berperan dalam perekonomian Indonesia melalui pembentukan PDB, perolehan devisa (meskipun masih tergolong kecil/sedikit), penyediaan pangan dan bahan baku industry, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran pertanian dalam mengentaskan kemiskinan menjadi begitu penting dan begitu sentral (Bisnis Indonesia, 2012)

Namun demikian pertanian di Indonesia belum mampu beranjak kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Program pembangunan pertanian masih terseret dalam urusan subsisten dengan penguasaan lahan sebagian besar petani yang relatif kecil terutama di pulau Jawa, dengan rata-rata antara 0,3 sampai dengan 0,5 hektar ditambah sarat fragmentasi lahan (alih guna lahan pertanian menjadi industry dan perumahan dan property). Akibatnya masih menghasilkan produk primer dengan produktifitas yang rendah, termasuk produk hasil pertanian yang ditujukan untuk ekspor, efeknya nilai tambah yang diperoleh petani relative kecil. Jika kemudian terjadi lonjakan nilai devisa dari sektor pertanian, bukan karena produk yang diekspor (nilai tambah) tetapi lebih dikarenakan adanya kenaikan harga dari produk pertanian primer. Diluar pulau Jawa, kepemilikan lahan relative lebih luas, tetapi hasilnya juga belum memadai.

Sektor pertanian sebenarnya dapat dijadikan salah satu tumpuan untuk memperbaiki ekonomi apabila pemerintah mempunyai kemauan dan komitmen yang serius untuk

memberikan stimulant yang dapat mendorong pertumbuhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pemerintah melalui departemen dan dinas terkait mendorong dan memberikan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pernyataannya di Waduk Jatiluhur, Purwakarta pada 11 Juni 2015 yang lalu mencanangkan program revitalisasi pertanian. Dimana dalam jangka panjang kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan pertanian adalah mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestic. Yaitu agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani (Kompas, 2005). Ini berarti sektor pertanian tetap menjadi salah satu sektor penentu dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan sekaligus dapat dijadikan sebagai jaring pengaman untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran serta meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Dalam pertemuan forum pemimpin redaksi media massa nasional di Nusa Dua Bali pada 14 Juni 2012. Menteri perdagangan saat itu (Gita Wiryawan) melontarkan dua gagasan mendasar dalam produksi dan pengelolaan pangan nasional yaitu (1) kementerian yang dipimpinnya mendapatkan hak eksklusif mengelola tata niaga pangan, dan (2) kebijakan strategi pangan bukan lagi hanya diarahkan pada pencapaian swasembada, tetapi menjadikan Indonesia sebagai eksportir bahan pangan yang paling efisien (Kompas 17 Juni 2013).

Kebijakan yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY, juga dilanjutkan dan dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahkan lebih konkrit lagi. Pada beberapa waktu setelah dilantik sebagai presiden yang ke tujuh, langkah konkrit untuk mendukung pembangunan sector pertanian dan mendorong percepatan kemandirian pangan dilakukan dengan membagikan alat-alat pertanian berupa traktor tangan, terutama di daerah-daerah pertanian. Disamping itu, untuk mendorong infrastruktur pendukung pertanian, juga telah dicanangkan program jangka panjang selain perbaikan-perbaikan waduk dan bendungan, juga membangun waduk-waduk dan embung-embung baru didaerah-daerah potensial untuk pengembangan pertanian dan industri pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Pusat maupun daerah untuk mendorong dan meningkatkan pendapatan petani tidak akan menarik bagi petani eksisting, maupun calon petani untuk mengandalkan hidup disektor pertanian apabila tidak dibuat suatu model pola pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian yang dapat menjamin petani untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan lanjutan riset tahun 2016, melalui studi dengan pendekatan analisis kelayakan ekonomi untuk proyek investasi di bidang usaha pertanian yang berupa usaha penggemukan sapi potong di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan pengembangan riset model pemberdayaan ekonomi petani dengan ssstem pertanian terintegrasi di desa Fatukoto, dan Iusmollo Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan desa Fatumeno, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Data penelitian:

Data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung dari masyarakat yang akan dilibatkan dalam proyek penelitian (anggota kelompok petani) atau petani individu yang berupa aktivitas usaha saat ini, kepemilikan lahan, lokasi usaha, dan data pendukung lainnya yang diperlukan dalam analisis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data yang berupa peraturan-peraturan yang berlaku baik kebijakan nasional maupun daerah yang berhubungan dengan kebijakan pertanian, penggunaan lahan, policy jangka pendek dan panjang. Arah dan kebijakan spesifik di bidang pertanian yang dikeluarkan oleh Pemda, Pemprop, dan Pusat, serta data lain yang relevan.
3. Studi lapangan, melakukan observasi langsung di daerah yang dijadikan obyek penelitian.
4. Fokus Group Discussion (FGD), untk mendapatkan informasi yang akurat tentang kebutuhan dan pemecahan masalah sesuai dengan ide proyek investasi, permasalahan yang dihadapi, alternative solusi yang ditawarkan dan pilihan-pilihan alternative yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah.
5. Wawancara, diskusi, dan konsultasi dengan nara sumber, untuk melakukan pengkajian bersama dengan mendatangi atau menghadirkan nara sumber dari dinas terkait (Dinas pertanian, Peternakan, Bappeda, dan lainnya yang relevan).

Analisis data:

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan dua cara yaitu analisis diskriptif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis diskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan potensi serta identifikasi area proyek investasi secara kualitatif berbasis pada data statistik diskriptif.
2. Analisis kuantitatif, digunakan untuk mengetahui kelayakan proyek secara financial, manfaat serta nilai tambah yang akan diperoleh dari pelaksanaan proyek dari sudut pandang dan aspek ekonomi.

PEMBAHASAN

Dari analisis data lapangan yang dilakukan melalui diskusi terbatas dengan kelompok-kelompok terkait, pengamatan lapangan di daerah penelitian, dan data sekunder yang berupa catatan statistik yang tersedia.

Diperoleh temuan, bahwa sebagian besar penduduk memiliki kegiatan ekonomi utama adalah sebagai petani. Hasil pertanian utama berupa padi, jagung, sayuran dan buah-buahan (jeruk atau lemon). Hasil dari tanaman keras berupa biji kemiri. Hasil pertanian tanaman pangan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga petani, dan baru akan dijual apabila ada sisa dari kebutuhan untuk konsumsi. Untuk hasil kebun yang berupa sayuran selain untuk kebutuhan konsumsi, dijual kepasar untuk memenuhi kebutuhan keuangan harian yang diperlukan.

Hasil dari tanaman musiman berupa lemon dijual dipasar, biji kemiri langsung dijual kepada pengepul dalam bentuk mentah dan belum ada usaha untuk mengupas atau memproses menjadi produk setengah jadi atau mengolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih baik.

Selain sebagai petani, sebagian besar atau bahkan hampir semua petani memiliki kegiatan beternak sapi, babi, kuda, dan kerbau. Usaha ternak yang dilakukan oleh petani menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup diluar kebutuhan pangan. Hasil dari peternakan, terutama sapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan yang relatif besar, untuk membiayai pendidikan/sekolah anak ketika mulai masuk SMP, SMA atau kuliah yang harus keluar dari desa sehingga memerlukan biaya transportasi, kos dan sebagainya. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan insidental pesta pernikahan, kelahiran anak, membuat/memperbaiki rumah dan kebutuhan lain yang harus dibeli.

Dalam hal menjual hasil ternak (terutama sapi) biasanya dilakukan dengan membawa ke pasar atau mendatangi calon pembeli (pengepul) ketika mereka memerlukan uang. Kondisi dan cara penjudulan hasil ternak seperti ini yang membuat mereka lebih sering tidak dapat menjual ternak mereka dengan harga yang maksimal sesuai dengan harga normal. Karena ingin segera mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehingga harga jual ternak mereka sering lebih banyak ditentukan oleh pembeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya, karena harus segera mendapatkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam kaitan dengan penelitian ini fokus utamanya adalah melakukan pengkajian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para petani-peternak dalam kaitan dengan memperkuat daya saing dan bargaining power sebagai produsen supaya dapat mendapatkan hasil yang layak dari kegiatan ekonomi mereka. Dari data lapangan yang diperoleh dengan berbagai pendekatan diatas, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh petani-peternak dalam hal menjalankan peran ekonomi yang berkaitan dengan usaha peternakan mereka adalah dengan cara bekerja sama dengan membentuk kelompok-kelompok usaha bersama (KUB). Atau apapun namanya, tetapi salah satu cara untuk mempunyai kekuatan daya saing dan bargaining power dalam transaksi perdagangan caranya adalah dengan bergabung membuat kelompok usaha sebagai peternak-petani sapi. Dengan mereka bergabung dalam satu kelompok akan memperkuat daya tawar mereka kepada calon pembeli dan tidak terjadi persaingan diantara mereka sendiri. Selain memiliki kekuatan dan bargaining power yang lebih baik, keberadaan kelompok usaha dapat dijadikan alat untuk saling membantu diantara mereka pada saat menghadapi permasalahan teknis maupun ekonomis yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan usaha mereka.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa dengan pendirian KUB diharapkan para petani sapi dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama secara berkelompok. Dimana kelompok yang dibentuk diharapkan dapat digunakan sebagai sarana membangun kekuatan daya saing dan bargaining power dalam (1) **menentukan harga jual yang layak**; (2) **sarana belajar dan bekerjasama** dalam memelihara ternak yang baik; (3) **membangun modal bersama** melalui tabungan sisa hasil penjualan sapi; (4) **sebagai embrio membangun kemandirian** dan pembentukan bank peternak sapi di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, B. 2005. Pengembangan Agro Industri menuju tahun 2010. Peluang dan Tantangan. Perhepi, Jakarta.
- Baharsyah S., 1997, Membangun Kemandirian dan Daya saing pertanian Nasional dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas, Perhepi, Jakarta.
- Emil Salim, 2013, Sukses Bisnis & Beternak Sapi Potong, Lily Publisher, Jogjakarta
- Gittinger, Price J., 1986, Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian ed. 2.,(terjemahan) UI – Press, Jakarta.
- Gunawan Somodiningrat, Ari Wulandari, 2016., Membangun Indonesia Dari Desa,

Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Media Pressindo, Yogyakarta.

Jamal, Erizal, Djauhari, Ahmad, 1998, Kebijakan Alih Fungsi Lahan Sawah, Agro Ekonomika, No. 2 tahun XXVII, Oktober 1997.

Kasriyono, F., 2002, Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan pengembangan system usaha pertanian menuju era globalisasi ekonomi, Balitbang Pertanian, deptan, Bogor.

Kasriyono F., Syafaat N., 2000, Strategi pembangunan pertanian yang berorientasi pemerataan di tingkat petani, PPSE, Balitbang Pertanian, Bogor.

Sihombing, Martin., Nilai tambah dan swasembada jadi sasaran, Bisnis Indonesia, 2009.

Mubyarto, 1972. Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta.

Sri-Edi Swasono, 2015, Keindonesiaan, Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian, UST-Press, Jogjakarta.

Swa Sembada, Merebut kembali Kejayaan Agrobisnis, No. 12/XXV/Juni 2009.
[www. Deptan.go.id](http://www.Deptan.go.id).

Bisnis Indonesia, Arah Bisnis dan Politik 2009. Suplemen, 2009.

Kompas, April 2009.

Kompas, Nopember 2014.

Kompas, Nopember 2015.

Kompas, Januari 2016.

Kompas, Maret 2016.